

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaku ekonomi di Indonesia jika digolongkan berdasarkan jenisnya terbagi menjadi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Perekonomian yang berlangsung di Indonesia harus terkendali dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, baik untuk produsen, konsumen, maupun distributor.

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk melakukan kegiatan manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana maupun penggunaan dana untuk pembiayaan operasional maupun untuk kebutuhan investasi secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah dituntut secara efektif dan efisien melalui peran organisasi, koordinasi, pengarahan dan evaluasi yang baik (Sumarson,2010).

Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 2 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar.

Otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi. Menurut Pekei (2016), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan (Machmud, 2014). Otonomi daerah yang diberlakukan menuntut pemerintah maka pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas pemerintah daerahnya masing-masing (Magdalena & Kurniawan, 2013:92).

Salah satu kabupaten yang terdampak dari kebijakan otonomi daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau OKU Selatan merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2005. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, maka kabupaten OKU Selatan dituntut untuk melaksanakan berbagai fungsi otonomi dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan menuntut setiap rupiah uang publik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban tersebut tidaklah cukup hanya dengan laporan lisan, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai (Mahmudi, 2016:2). Salah satu indikator berhasilnya kinerja keuangan disuatu kabupaten/kota bisa dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Setiap pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun sesuai aturan yang berlaku untuk dinilai apakah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Pertanggung jawaban ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya dapat melalui laporan keuangan daerah yang kompetitif berupa laporan keuangan daerah yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Kemenkeu, 2018). Laporan keuangan berfungsi untuk menginstropeksi kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama ini sesuai hakikat akuntansi. Introspeksi dilakukan berkaitan dengan penggunaan dana yang diawasi dengan maksimal sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang ada. Suatu laporan keuangan yang baik pasti memudahkan semua pihak karena hanya perlu meneruskan dan mengembangkan usaha.

Analisis laporan keuangan bisa menjadi salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Analisis laporan keuangan ini berfokus pada laporan keuangan yang memanfaatkan sebuah teknik analisis untuk mengetahui dan memahami isu serta peluang yang ada sehingga akan sangat bermanfaat dalam upaya pengambilan suatu keputusan. Pengukuran kinerja juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan analisis laporan keuangan dari pemerintah daerah akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan telah dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa teknik analisis untuk menganalisis laporan keuangan, diantaranya analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam melakukan perhitungan salah satunya menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Farida (2018) yaitu menganalisis laporan keuangan Daerah Subang dengan menggunakan metode analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas. Dimana didapatkan hasil rasio kemandirian daerah sangat baik sebesar 245,61%, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif dengan rasio 99,20%, rasio efisiensi daerah tergolong sangat efisien karena rata – rata besarnya rasio ini sebesar 1,04%, dan rasio keserasian sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%. Supriadi (2016) menganalisis laporan keuangan daerah pada kota Tangerang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan. Di dapatkan hasil penelitian rasio kemandirian keuangan wilayah Kota Tangerang berkisar antara 20% hingga 68%, tingkat pertumbuhan (PAD) Kota Tangerang berkisar antara 09% hingga 45%, Maka, dapat disimpulkan laporan keuangan kota Tangerang sangat baik.

Anshori (2019) menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018 dengan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian realisasi PAD dan pajak daerah tergolong efisien, Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah. Serta Ramadhan (2018) menganalisis kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dari segi kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 19,65%, sedangkan dari segi efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar

96,84%, dan dari segi pertumbuhan juga sudah positif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 13,87%.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Selatan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKAD Kabupaten Oku Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerah otonomnya sendiri.

Berikut merupakan daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten OKU Selatan pada tahun 2016-2020 :

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
2016	Rp 35.696.930.000
2017	Rp 89.517.650.000
2018	Rp 42.882.720.000
2019	Rp 57.669.040.000
2020	Rp 58.889.193.295

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Selatan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2016 jumlah PAD Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp.35.696.930.000. Lalu, di tahun 2017 mengalami peningkatan lebih dari 100% yaitu menjadi Rp.89.517.650.000. Selanjutnya di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU selatan berjumlah Rp. 42.882.720.000. Namun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.57.669.040.000 di tahun 2019 dan Rp.58.889.193.295 di tahun 2020.

Adapun beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten OKU Selatan antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah

kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Selatan tahun 2016-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah OKU Selatan berdasarkan analisis rasio efektifitas, aktivitas, pertumbuhan, kemandirian dan efisiensi tahun 2016-2020?”.

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran penulis akan meneliti sebatas pada analisis keuangan pemerintah daerah kabupaten OKU Selatan tahun 2010-2016 menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Mengukur dan menganalisis kinerja keuangan

daerah kabupaten OKU Selatan tahun 2016-2020 menggunakan rasio keuangan (rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas)”.  
daerah, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas)”.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen keuangan daerah.
2. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah.

###### 2. Bagi Pihak Pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui seberapa besar kinerja keuangan yang telah dicapai dan faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya nilai bobot yang dimiliki untuk penilaian tingkat kesehatan keuangan daerah.

###### 3. Masyarakat

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.